

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RENJA) K/L
BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2023**

686438 SATKER BAWASLU PROVINSI GORONTALO

UKE (Unit Kerja)	Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator Komponen Input	Volume / Target	Satuan	Pagu Anggaran TA. 2023	
1	2	3	4	5	6	7	
	115.CQ	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI				45,017,468,000	
PROVINSI & Kab/Kota	5245	TEKNIS PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILU OLEH BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA				883,050,000	
	5245.BAH	Pelayanan Publik Lainnya		10	Layanan, Bidang, Dokumen, Bulan	167,492,000	
	5245.BAH.001	Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota		10	Layanan, Bidang, Dokumen, Bulan	167,492,000	
		Komponen Input :					
Provinsi		201	Pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran (Provinsi)	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran	1	Laporan	45,246,000
Provinsi		202	Pembinaan/pelaksanaan penyelesaian sengketa proses (Provinsi)	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	1	Laporan	45,246,000
kab/kota		301	Koordinasi penanganan pelanggaran (Kab./Kota)	Jumlah laporan semesteran penyelenggaraan penanganan dan penindakan pelanggaran	4	Laporan	38,500,000
kab/kota		302	Koordinasi penyelesaian sengketa proses (Kab./Kota)	Jumlah laporan semesteran penyelenggaraan penyelesaian sengketa proses	4	Laporan	38,500,000
	5245.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		1	Lembaga, Unit Kerja, Tim	33,344,000	
RPJMN	5245.BDB.001	Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif		1	Lembaga, Unit Kerja, Tim	33,344,000	
		Komponen Input :					
Provinsi		201	Pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif (Provinsi)	Jumlah daerah yang mengembangkan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif	1	Daerah	33,344,000
	5245.BKC	Pemantauan Lembaga		25	Laporan	682,214,000	
	5245.BKC.001	Laporan Hasil Pencegahan/ Pengawasan Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota		25	Laporan	682,214,000	
		Komponen Input :					
Provinsi		201	Pengawasan pemilu partisipatif (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan pemilu partisipatif	1	Laporan	38,965,000
Provinsi		202	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Provinsi)	Jumlah laporan semesteran fasilitasi dan koordinasi menghadiri undangan Bawaslu RI dan Instansi terkait	1	Laporan	163,010,000
Provinsi		203	Evaluasi pelaksanaan pengawasan (Provinsi)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan pengawasan	1	Laporan	57,660,000
Provinsi		204	Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan (Provinsi)	Jumlah kegiatan pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan	1	Laporan	44,239,000
Provinsi		205	Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas (Provinsi)	Jumlah fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas	1	Laporan	30,735,000
kab/kota		301	Pengawasan pemilu partisipatif (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan pemilu partisipatif	4	Laporan	107,145,000
kab/kota		302	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kab./Kota)	Jumlah laporan semesteran fasilitasi dan koordinasi menghadiri undangan Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Instansi terkait	4	Laporan	108,520,000
kab/kota		303	Evaluasi pelaksanaan pengawasan (Kab./Kota)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan pengawasan	4	Laporan	21,540,000
kab/kota		304	Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan (Kab./Kota)	Jumlah kegiatan pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan	4	Laporan	40,320,000
kab/kota		305	Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas (Kab./Kota)	Jumlah fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas	4	Laporan	70,080,000
	6661	PERENCANAAN, PROGRAM DAN ANGGARAN SERTA PENYUSUNAN PERATURAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN				18,296,571,000	
	6661.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		561	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	18,226,571,000	
	6661.QIC.001	Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu		202	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	17,592,271,000	
		Komponen Input :					

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RENJA) K/L
BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2023**

686438 SATKER BAWASLU PROVINSI GORONTALO

UKE (Unit Kerja)	Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator Komponen Input	Volume / Target	Satuan	Pagu Anggaran TA. 2023	
1	2	3	4	5	6	7	
Provinsi		201	Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu (Provinsi)	Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu	1	Dokumen	12,748,000
Provinsi		202	Sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu (Provinsi)	Jumlah laporan sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu	2	Laporan	62,511,000
Provinsi		203	Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu (Provinsi)	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu	4	Laporan	235,958,000
Provinsi		204	Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif (Provinsi)	Jumlah laporan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif	2	Laporan	361,714,000
Provinsi		205	Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran (Provinsi)	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran	4	Laporan	592,793,000
Provinsi		206	Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa (Provinsi)	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa	4	Laporan	56,144,000
Provinsi		207	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Provinsi)	Jumlah laporan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan	4	Laporan	2,056,632,000
Provinsi		208	Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu (Provinsi)		4	Laporan	45,568,000
Kabupaten/Kota		301	Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu (Kab./Kota)	Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu	1	Laporan	150,317,000
Kabupaten/Kota		302	Sosialisasi dan implementasi peraturan dan non peraturan Bawaslu (Kab./Kota)	Jumlah laporan sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu	8	Laporan	439,779,000
Kabupaten/Kota		303	Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu (Kab./Kota)	Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu	16	Laporan	2,287,880,000
Kabupaten/Kota		304	Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif (Kab./Kota)	Jumlah laporan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif	8	Laporan	1,157,893,000
Kabupaten/Kota		305	Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran (Kab./Kota)	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran	16	Laporan	1,931,080,000
Kabupaten/Kota		306	Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa (Kab./Kota)	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa	16	Laporan	594,504,000
Kabupaten/Kota		307	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kab./Kota)	Jumlah laporan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan	16	Laporan	2,968,680,000
Kabupaten/Kota		308	Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu (Kab./Kota)		16	Laporan	438,230,000
Kecamatan		401	Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu (Kecamatan)	Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu	40	Laporan	1,122,040,000
Kecamatan		402	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kecamatan)	Jumlah laporan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan	40	Laporan	3,077,800,000
	6661.QIC.003	Seleksi Anggota Badan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilu Ad-Hoc			359	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	634,300,000
		Komponen Input :					
Kecamatan		401	Rekrutmen panwaslu desa/kelurahan (Kecamatan)	Jumlah daerah yang melaksanakan rekrutmen pengawas pemilu	359	Daerah	634,300,000
	6661.UAB	Sistem Informasi Pemerintahan			3	Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan	70,000,000
	6661.UAB.001	Pengembangan Sistem Informasi Bawaslu			3	Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan	70,000,000
		Komponen Input :					
Provinsi		201	Pengadaan sarpras pendukung sistem informasi (Provinsi)		3	Unit	70,000,000
Kabupaten/Kota		301	Pengadaan sarpras pendukung sistem informasi (Kab./Kota)		...	Unit	0
	6662	PENGAWASAN PENDAFTARAN DAN					19,834,000

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RENJA) K/L
BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2023**

686438 SATKER BAWASLU PROVINSI GORONTALO

UKE (Unit Kerja)	Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator Komponen Input	Volume / Target	Satuan	Pagu Anggaran TA. 2023	
1	2	3	4	5	6	7	
	6662.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		3	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	19,834,000	
	6662.QIC.001	Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu		3	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	19,834,000	
		Komponen Input :					
Provinsi		203	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu (Provinsi)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	1	Laporan	13,600,000
Kabupaten/Kota		303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu (Kab./Kota)	Jumlah laporan fasilitasi sentra gakkumdu	2	Laporan	6,234,000
	6838	PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU OLEH LEMBAGA AD-HOC				20,011,762,000	
	6838.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		885	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	20,011,762,000	
	6838.QIC.001	Honorarium Pengawas Ad-Hoc		398	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	11,951,900,000	
		Komponen Input :					
Kecamatan		401	Honorarium (Kecamatan)		40	Daerah	7,608,000,000
Kelurahan/Desa		501	Honorarium (Kelurahan/Desa)		358	Orang	4,343,900,000
	6838.QIC.002	Operasional Pengawas Ad-Hoc		487	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	8,059,862,000	
		Komponen Input :					
Kabupaten/Kota		301	Sewa kendaraan operasional (Kab./Kota)		4	Lembaga	2,448,360,000
Kabupaten/Kota		302	Sewa gedung/ peralatan/ meubelair (Kab./Kota)		4	Lembaga	408,000,000
Kecamatan		402	Sewa gedung/ peralatan/ meubelair (Kecamatan)		40	Daerah	2,897,400,000
Kecamatan		403	Pemeliharaan gedung/ meubelair/ peralatan (Kecamatan)		40	Daerah	316,032,000
Kecamatan		404	Pelayanan operasional perkantoran (Kecamatan)		40	Daerah	1,617,145,000
Kelurahan/Desa		502	Penanda Identitas (Kelurahan/Desa)		359	Orang	372,925,000
	6839	PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA				1,861,360,000	
	6839.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		414	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	1,673,560,000	
	6839.QIC.001	Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih		414	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	1,673,560,000	
		Komponen Input :					
Provinsi		201	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Provinsi)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	1	Laporan	8,010,000
Provinsi		202	Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih	1	Laporan	30,710,000
Provinsi		203	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Provinsi)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	1	Laporan	56,540,000
Kabupaten/Kota		301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kab./Kota)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	4	Laporan	38,080,000
Kabupaten/Kota		302	Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih	4	Laporan	83,520,000
Kabupaten/Kota		303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kab./Kota)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	4	Laporan	357,100,000
Kecamatan		401	Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kecamatan)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih	40	Laporan	668,800,000

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RENJA) K/L
BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2023**

686438 SATKER BAWASLU PROVINSI GORONTALO

UKE (Unit Kerja)	Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator Komponen Input	Volume / Target	Satuan	Pagu Anggaran TA. 2023
1	2	3	4	5	6	7
Kelurahan/Desa		501 Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kelurahan/Desa)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih	359	Laporan	430,800,000
	6839.QCE	Penanganan Perkara		5	Perkara, Berkas Perkara	187,800,000
	6839.QCE.001	Penanganan Pelanggaran Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih		5	Perkara, Berkas Perkara	187,800,000
		Komponen Input :				
Provinsi		202 Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	1	Perkara	54,360,000
Kabupaten/Kota		302 Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	4	Perkara	133,440,000
	6840	PENGAWASAN PENETAPAN PESERTA PEMILU				47,562,000
	6840.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		15	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	45,007,000
	6840.QIC.001	Pengawasan Penetapan Peserta Pemilu		15	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	45,007,000
		Komponen Input :				
Provinsi		201 Publikasi dan dokumentasi pengawasan penetapan peserta pemilu (Provinsi)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	1	Laporan	300,000
Provinsi		202 Pengawasan penetapan peserta pemilu (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan tahapan penetapan peserta pemilu	1	Laporan	23,585,000
Provinsi		203 Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan penetapan peserta pemilu (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan fasilitasi sentra gakkumdu	1	Laporan	0
Kabupaten/Kota		301 Publikasi dan dokumentasi pengawasan penetapan peserta pemilu (Kab./Kota)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	4	Laporan	2,750,000
Kabupaten/Kota		302 Pengawasan penetapan peserta pemilu (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan tahapan penetapan peserta pemilu	4	Laporan	18,372,000
Kabupaten/Kota		303 Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan penetapan peserta pemilu (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan fasilitasi sentra gakkumdu	4	Laporan	0
	6840.QCE	Penanganan Perkara		1	Perkara, Berkas Perkara	2,555,000
	6840.QCE.001	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Penetapan Peserta Pemilu		1	Perkara, Berkas Perkara	2,555,000
		Komponen Input :				
Provinsi		201 Pengelolaan data penanganan pelanggaran penetapan peserta pemilu (Provinsi)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	0	Berkas Perkara	0
Provinsi		202 Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan peserta pemilu (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	1	Perkara	2,555,000
Provinsi		203 Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses penetapan peserta pemilu (Provinsi)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	0	Perkara	0
Kabupaten/Kota		301 Pengelolaan data penanganan pelanggaran penetapan peserta pemilu (Kab./Kota)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	0	Berkas Perkara	0
Kabupaten/Kota		302 Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan peserta pemilu (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	0	Perkara	0
Kabupaten/Kota		303 Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses penetapan peserta pemilu (Kab./Kota)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	0	Perkara	0
	6841	PENGAWASAN PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN				108,316,000
	6841.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		6	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	43,056,000
	6841.QIC.001	Pengawasan Penetapan Jumlah Kursi Dan Penetapan Daerah Pemilihan		6	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	43,056,000
		Komponen Input :				
Provinsi		201 Publikasi dan dokumentasi pengawasan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Provinsi)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	1	Laporan	3,955,000
Provinsi		202 Pengawasan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	1	Laporan	31,205,000

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RENJA) K/L
BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2023**

686438 SATKER BAWASLU PROVINSI GORONTALO

UKE (Unit Kerja)	Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator Komponen Input	Volume / Target	Satuan	Pagu Anggaran TA. 2023
1	2	3	4	5	6	7
Kabupaten/Kota		301 Publikasi dan dokumentasi penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Kab./Kota)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	1	Laporan	500,000
Kabupaten/Kota		302 Pengawasan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	3	Laporan	7,396,000
	6841.QCE	Penanganan Perkara		4	Perkara, Berkas Perkara	65,260,000
	6841.QCE.001	Penanganan Pelanggaran Penetapan Jumlah Kursi Dan Penetapan Daerah Pemilihan		4	Perkara, Berkas Perkara	65,260,000
		Komponen Input :				
Provinsi		201 Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	1	Perkara	38,160,000
Kabupaten/Kota		301 Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	3	Perkara	27,100,000
	6842	PENGAWASAN PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA				3,789,013,000
	6842.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		55	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	2,986,591,000
	6842.QIC.001	Pengawasan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota		55	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	2,986,591,000
		Komponen Input :				
Provinsi		201 Publikasi dan dokumentasi pengawasan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	1	Laporan	9,510,000
Provinsi		202 Pengawasan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab./Kota	1	Laporan	69,456,000
Provinsi		203 Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	1	Laporan	53,565,000
Kabupaten/Kota		301 Publikasi dan dokumentasi pengawasan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	4	Laporan	38,060,000
Kabupaten/Kota		302 Pengawasan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab./Kota	4	Laporan	385,300,000
Kabupaten/Kota		303 Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	4	Laporan	357,100,000
Kecamatan		401 Pengawasan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kecamatan)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab./Kota	40	Laporan	2,073,600,000
	6842.QCE	Penanganan Perkara		15	Perkara, Berkas Perkara	802,422,000
	6842.QCE.001	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan		15	Perkara, Berkas Perkara	802,422,000
		Komponen Input :				
Provinsi		201 Pengelolaan data penanganan pelanggaran pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	1	Berkas Perkara	13,052,000
Provinsi		202 Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	1	Perkara	109,490,000
Provinsi		203 Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	1	Perkara	54,960,000

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RENJA) K/L
BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2023**

686438 SATKER BAWASLU PROVINSI GORONTALO

UKE (Unit Kerja)	Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator Komponen Input	Volume / Target	Satuan	Pagu Anggaran TA. 2023
1	2	3	4	5	6	7
Kabupaten/Kota		301 Pengelolaan data penanganan pelanggaran pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	4	Berkas Perkara	413,400,000
Kabupaten/Kota		302 Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	4	Perkara	105,760,000
Kabupaten/Kota		303 Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	4	Perkara	105,760,000
	115.WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN				13,110,215,000
	6849	PENGELOLAAN KEUANGAN, BMN, DAN UMUM				11,870,530,000
	6849.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		15	Layanan, Laporan, Dokumen	11,166,811,000
	6849.EBA.956	Layanan BMN		5	Layanan, Laporan, Dokumen	126,202,000
		Komponen Input :				
Provinsi		201 Pembinaan dan pengelolaan BMN Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan pembinaan dan pengelolaan BMN yang sesuai dengan ketentuan	1	Laporan	102,952,000
Kab/kota		301 Pengelolaan BMN Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan inventarisasi aset	4	Laporan	23,250,000
	6849.EBA.994	Layanan Perkantoran		10	Layanan, Laporan, Dokumen	11,040,609,000
		Komponen Input :				
Provinsi/Kab/kota		001 Gaji dan tunjangan	Persentase penyelesaian pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu	5	Layanan	5,594,916,000
Provinsi/Kab/kota		002 Operasional dan pemeliharaan kantor	Persentase penyelesaian pembayaran gaji pegawai kontrak yang tepat waktu	5	Layanan	5,445,693,000
	6849.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		15	Unit, M2, Paket	90,376,000
	6849.EBB.951	Layanan Sarana Internal		15	Unit, M2, Paket	90,376,000
		Komponen Input :				
Provinsi		202 Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Bawaslu Provinsi	Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	...	Unit	0
Provinsi		203 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Bawaslu Provinsi	Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	15	Unit	90,376,000
Kab/kota		302 Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	...	Unit	0
Kab/kota		303 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	...	Unit	0
	6849.EBB.971	Layanan Prasarana Internal		...	Unit, M2, Paket	0
		Komponen Input :				
Provinsi		201 Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan Bawaslu Provinsi	Jumlah pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan	...	Unit	0
Kab/kota		301 Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan	...	Unit	0
	6849.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		20	Dokumen, Layanan, Laporan	613,343,000
	6849.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran		5	Dokumen, Layanan, Laporan	59,858,000
		Komponen Input :				
Provinsi		201 Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran	1	Dokumen	41,448,000
Kab/kota		301 Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran	4	Dokumen	18,410,000
	6849.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		5	Dokumen, Layanan, Laporan	52,100,000
		Komponen Input :				

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RENJA) K/L
BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2023**

686438 SATKER BAWASLU PROVINSI GORONTALO

UKE (Unit Kerja)	Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator Komponen Input	Volume / Target	Satuan	Pagu Anggaran TA. 2023
1	2	3	4	5	6	7
Provinsi		201 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program	1	Dokumen	47,260,000
Kab/kota		301 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program	4	Dokumen	4,840,000
	6849.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan		5	Dokumen, Layanan, Laporan	473,767,000
		Komponen Input :				
Provinsi		201 Pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan	1	Dokumen	169,292,000
Kab/kota		301 Pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan	4	Dokumen	304,475,000
	6849.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan Bawaslu		5	Dokumen, Layanan, Laporan	27,618,000
		Komponen Input :				
Provinsi		201 Pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan	1	Dokumen	7,850,000
Kab/kota		301 Pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan	4	Dokumen	19,768,000
	6850	PENGLOLAAN ORGANISASI DAN SDM				1,029,629,000
	6850.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		19	Layanan, Laporan, Dokumen	898,133,000
	6850.EBA.957	Layanan Hukum		11	Layanan, Laporan, Dokumen	136,368,000
		Komponen Input :				
Provinsi		201 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum di Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum yang diselenggarakan sesuai ketentuan	1	Laporan	37,958,000
Provinsi		202 Diseminasi produk hukum di Bawaslu Provinsi	Laporan diseminasi produk hukum terkait kepemiluan	1	Laporan	33,240,000
Provinsi		203 Kajian hukum di Bawaslu Provinsi	Laporan kajian hukum	1	Laporan	5,850,000
Kab/kota		301 Fasilitasi pengelolaan layanan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan produk hukum dan layanan hukum	4	Laporan	48,680,000
Kab/kota		302 Kajian hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	Laporan kajian hukum	4	Laporan	10,640,000
	6850.EBA.962	Layanan Umum		2	Layanan, Laporan, Dokumen	658,145,000
		Komponen Input :				
Provinsi		201 Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Provinsi		1	Laporan	66,614,000
Kab/kota		301 Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota		1	Laporan	591,531,000
	6850.EBA.969	Layanan Bantuan Hukum		6	Layanan, Laporan, Dokumen	103,620,000
		Komponen Input :				
Provinsi		201 Pendampingan dan layanan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan advokasi pelanggaran dan pidana pemilu/pemilihan yang diselenggarakan sesuai ketentuan	1	Laporan	29,200,000
Provinsi		202 Pembinaan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan pembinaan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi	1	Laporan	34,420,000
Kab/kota		301 Bantuan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan advokasi pelanggaran dan pidana pemilu/pemilihan yang diselenggarakan sesuai ketentuan	4	Laporan	40,000,000

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RENJA) K/L
BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2023**

686438 SATKER BAWASLU PROVINSI GORONTALO

UKE (Unit Kerja)	Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator Komponen Input	Volume / Target	Satuan	Pagu Anggaran TA. 2023	
1	2	3	4	5	6	7	
	6850.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal		5	Orang, Layanan	131,496,000	
	6850.EBC.954	Layanan Manajemen SDM		5	Orang, Layanan	131,496,000	
		Komponen Input :					
Provinsi		201	Pembinaan SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Provinsi	1	Orang	61,936,000	
Kab/kota		301	Manajemen SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Kabupaten/Kota	4	Orang	69,560,000	
	4355	PEMERIKSAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN INTERNAL				29,710,000	
	4355.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		5	Dokumen, Layanan, Laporan	29,710,000	
	4355.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja		5	Dokumen, Layanan, Laporan	29,710,000	
		Komponen Input :					
Provinsi		201	Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi	1	Dokumen	9,300,000	
Kab/kota		301	Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Kabupaten/Kota	4	Dokumen	20,410,000	
	4356	PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI				180,346,000	
	4356.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		10	Layanan, Laporan, Dokumen	180,346,000	
	4356.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Bawaslu		5	Layanan, Laporan, Dokumen	65,922,000	
		Komponen Input :					
Provinsi		201	Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Provinsi	1	Laporan	45,232,000	
Kab/kota		301	Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	4	Laporan	20,690,000	
	4356.EBA.963	Layanan Data dan Informasi		5	Layanan, Laporan, Dokumen	114,424,000	
		Komponen Input :					
Provinsi		201	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Provinsi	1	Laporan	93,734,000	
Kab/kota		301	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	4	Laporan	20,690,000	
		TOTAL					58,127,683,000

GORONTALO, 123 JANUARI 2023
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NIKSON ENTENGO, S.IP., M.Si